

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang diselenggarakan melalui sistem informasi dan lintas sektor.⁽¹⁾ Tujuannya agar data yang ada di puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya dapat terintegrasi dengan data yang ada di Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Dinas Kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan Nasional.

Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Namun, seringkali para pembuat kebijakan di bidang kesehatan mengalami kesulitan dalam hal pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketidaktersediaan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan, yaitu pada proses manajemen, pengambilan keputusan, pemerintahan, dan penerapan akuntabilitas.⁽²⁾

Sistem informasi kesehatan yang dikembangkan secara nasional dan didukung oleh sistem informasi kesehatan daerah merupakan sarana yang sangat penting bagi manajemen kesehatan untuk dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat, cepat, tepat bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pengambilan keputusan baik untuk manajemen pasien/klien, manajemen unit/organisasi kesehatan, maupun manajemen sistem kesehatan serta bagi kepentingan masyarakat perlu penataan kembali manajemen sistem informasi kesehatan dan dikembangkan

jaringan komputer *online*.⁽³⁾ Sistem informasi yang selama ini dijalankan secara manual di bidang kesehatan menyebabkan data-data kesehatan di tingkat daerah terpisah sehingga terjadi tumpang tindih, duplikasi data, data sulit diakses, serta tidak terintegrasinya data dengan baik. Hal ini menimbulkan masalah bagi pengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang berdasarkan fakta yang ada (*evidence based*) seperti kebijakan yang dibuat jadi tidak tepat sasaran karena data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁽⁴⁾

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan menyebutkan bahwa dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan data, informasi dan indikator kesehatan yang dikelola dalam SIK. Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Kesehatan di suatu negara. Kemajuan atau kemunduran Sistem Informasi Kesehatan selalu berkorelasi dan mengikuti perkembangan Sistem Kesehatan, kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi bahkan mempengaruhi Sistem Pemerintahan yang berlaku di suatu Negara.⁽⁵⁾ Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia tidak berjalan secara optimal dan belum maksimal dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan. Puskesmas sebagai pelaksana kesehatan terendah mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan, dimana data antara satu laporan dari satu program dengan laporan lain dari program lainnya memiliki dataset yang hampir sama.⁽⁶⁾

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama.⁽⁷⁾ Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan

kabupaten/kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Lima Tahunan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.⁽⁸⁾

Pembaruan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dituangkan dalam bentuk Sistem Informasi Puskesmas. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Sistem Informasi Puskesmas merupakan Sistem Pencatatan dan Pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) maupun SIMPUS yang telah direvisi yang muncul dengan nama baru yaitu Sistem Informasi Puskesmas. Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota. Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Laporan kegiatan Puskesmas merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.⁽⁵⁾

Sistem Informasi Puskesmas saat ini sudah selesai tahapan sosialisasi dan pelatihan kepada semua provinsi di Indonesia dengan melibatkan seluruh program yang ada pencatatan dan pelaporannya di Puskesmas. Pada setiap pelatihan dengan melibatkan 11 orang pengelola program dan 1 orang pengelola data di provinsi. Setelah melatih petugas provinsi, kegiatan dilanjutkan dengan mengadakan workshop dan pelatihan tingkat kabupaten/kota oleh petugas provinsi secara berjenjang. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2016. Setelah itu, kabupaten/kota yang akan mengajarkan kembali kepada Puskesmas.⁽⁵⁾

Puskesmas Silago merupakan salah satu jenis puskesmas rawatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya yang belum mengaplikasikan program Sistem Informasi Puskesmas (SIP) dengan baik. Dari hasil rekapitulasi data SIP di Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, tingkat keterisian data Puskesmas Silago pada tahun 2016 hanya mencapai 74,8% dari target 100%, dibandingkan dengan Puskesmas lainnya yang tingkat keterisian data SIP mencapai 92%. Tingkat keterisian data SIP Puskesmas Silago merupakan yang terendah dari puskesmas lainnya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, dimana tingkat keterisian data SIP diantaranya puskesmas Koto Baru 90.7%, puskesmas Koto Besar 75.38%, puskesmas Padang Laweh 77.63%, puskesmas Sialang 90.3%, puskesmas Sitiung I 89.2%, puskesmas Sungai Dareh 85.95%, puskesmas Sungai Limau 90.75%, puskesmas Timpeh 77.83%, dan puskesmas Tiumang 91.95%.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Melalui SIK Terintegrasi menyatakan bahwa data Sistem Informasi Puskesmas dari puskesmas dikumpulkan tanggal 10 setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten.⁽⁹⁾ Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan petugas SIK Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, permasalahan SIP di Puskesmas Silago diantaranya keterlambatan dalam pengumpulan data ke Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, rata-rata Puskesmas Silago terlambat dalam mengirimkan data SIP setiap bulannya ke Dinas Kesehatan. Permasalahan SIP lainnya dimana sumber daya manusia yang kurang, jaringan internet yang kurang karena lokasi puskesmas yang jauh dari pusat kota, serta petugas SIP yang masih mengerjakan tugas rangkap.

Penelitian Bedri Amelia (2014) tentang Analisis SIMPUS di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar menyebutkan bahwa tenaga pengelola

SIMPUS masih kurang, dana untuk pengelola SIMPUS tidak ada, dan sarana prasarana tidak mendukung terlaksananya program SIMPUS dengan baik.⁽¹⁰⁾ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas di Puskesmas Silago tahun 2017.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas di Puskesmas Silago Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017?”

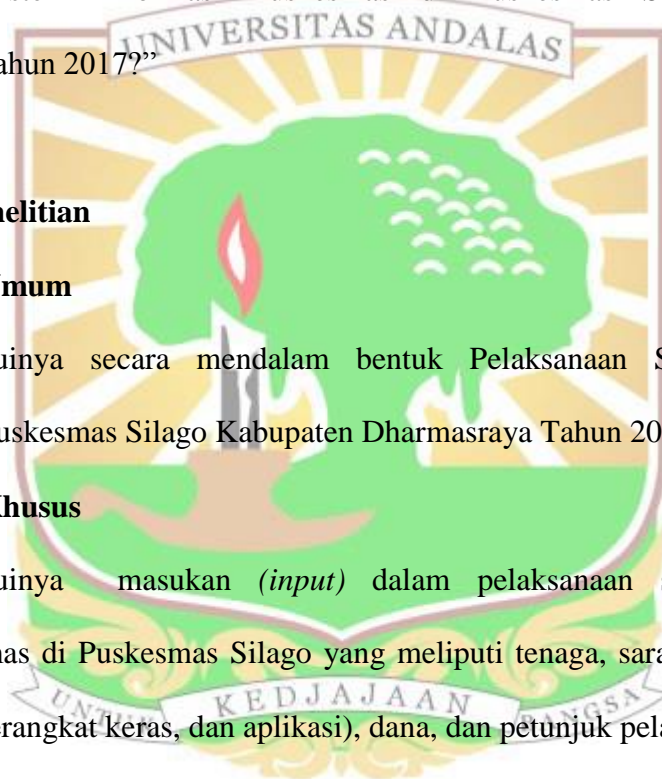
1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Diketuinya secara mendalam bentuk Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas di Puskesmas Silago Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketuinya masukan (*input*) dalam pelaksanaan sistem informasi puskesmas di Puskesmas Silago yang meliputi tenaga, sarana dan prasarana (data, perangkat keras, dan aplikasi), dana, dan petunjuk pelaksana
2. Diketuinya proses (*process*) pelaksanaan sistem informasi puskesmas di Puskesmas Silago meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan data
3. Diketuinya keluaran (*output*) yaitu pemanfaatan sistem informasi puskesmas di Puskesmas Silago



1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas diharapkan dapat menambah masukan dan bahan pertimbangan untuk perbaikan program sistem informasi puskesmas selanjutnya
2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai sumber informasi dan tersedianya data untuk keperluan yang berkaitan dengan pembahasan sistem informasi puskesmas
3. Bagi mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan topik

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas di Puskesmas Silago Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait pelaksanaan SIP, hal ini dapat dilihat dari aspek *input* (tenaga, sarana dan prasarana (data, perangkat keras, dan aplikasi), dana, dan petunjuk pelaksana) , *process* (pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan data), dan *output* (Pemanfaatan sistem informasi puskesmas) dari pelaksanaan program tersebut.

